TEMPO

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des

2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kementrian Lepas Tangan

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pernah melaporkan soal adanya dana siluman dalam APBD. Karena itu, Ahok—sapaan Basuki—ingin *e-budgeting* diberlakukan. "Supaya transparan," kata Tjahjo di Jakarta, kemarin.

Namun, kata Tjahjo, Kementerian tak bisa ikut campur ihwal rencana mayoritas anggota Dewan yang akan mengajukan hak angket kepada Ahok. "Itu masalah daerah," ujarnya. Yang jelas, urusan APBD Jakarta dan Kementerian sudah selesai.

Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai Ahok tak punya etika politik. Alasannya, menurut dia, banyak usul kegiatan Dewan yang tak masuk APBD yang disampaikan ke kementerian. Kalaupun ada, usul kegiatan itu telah diubah. Padahal, Prasetyo menjelaskan, usul itu adalah buah dari aspirasi masyarakat yang diterima anggota Dewan saat reses. "Kalau usul ditolak, buat apa ada reses?" ujarnya.

Ditolaknya usul soal kegiatan Dewan ini, menurut Prasetyo, membuktikan bahwa Ahok tak punya kompetensi dalam berkomunikasi dengan Dewan. Prasetyo menuding Ahok menabrak aturan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyusunan Tata Tertib DPRD. Dalam aturan itu, APBD yang ditetapkan adalah hasil keputusan bersama antara eksekutif dan legislatif.

Ahok menyatakan siap menghadapi hak angket yang bakal dilancarkan Dewan. "Silakan saja," katanya. "Kapan sih Ahok enggak siap?"

● TIKA PRIMANDARI | ERWAN HERMAWAN | GANGSAR PARIKESIT